



Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

L.M. Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, Hanafi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton – Indonesia

corresponding author: izharrazi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik serta faktor pendukung dan penghambat penerapan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penyelenggaraan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Buton sebagai sarana rekrutmen yaitu melalui Pendidikan Kader Pertama (PKP) diharapkan dapat menjaga kesinambungan dan percepatan program perjuangan partai dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu serta regenerasi kepemimpinan PKB. Melalui pendidikan pemula ini diharapkan para kader mempunyai semangat yang tinggi untuk mengembangkan Partai PKB di masyarakat dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap kader harus mengikuti beberapa tahapan terlebih dahulu dimulai dari kader pemula, madya dan selanjutnya hingga kader inti. Ada tiga tahapan pola pembentukan kader di partai PKB, yaitu: 1) Tingkat Dasar, 2) Tingkat Menengah, dan 3) Tingkat Lanjut. Faktor pendukung adalah segala faktor yang mendorong, menunjang, memperlancar, menunjang, menolong, mempercepat dan lain sebagainya. Sedangkan faktor penghambat adalah segala jenis faktor yang menghambat atau bahkan menghalangi terjadinya sesuatu. Faktor pendukung dan penghambat terselenggaranya Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buton adalah 1) Faktor pendukung meliputi gaya kepemimpinan, rekrutmen kader dan kader, mempunyai hubungan dengan rakyat, adanya pendanaan, dan wadah perjuangan. 2) Faktor penghambat gaya kepemimpinan, kontrol kader dalam politik, kepengurusan partai politik yang belum berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Kata kunci: Implementasi, Partai Politik, Rekrutmen Politik

Abstract

This research aims to find out the implementation of the function of political parties as a means of political recruitment and the supporting and inhibiting factors for the implementation of the function of political parties as a means of political recruitment. In this research, the author used a qualitative descriptive method. The results of this research are that the implementation of the National Awakening Party (PKB) in Buton Regency as a means of recruitment, namely through First Cadre Education (PKP), is expected to maintain continuity and accelerate the party's struggle program in preparing for the regeneration of PKB leadership. Through this beginner's education, cadres are expected to have high enthusiasm for developing the PKB party in society and upholding the Republic of Indonesia. Each cadre must follow several stages or stages first starting from beginner, intermediate and later to core cadre. There are three stages of the cadre formation pattern in the PKB party, namely: 1) Basic level 2) Intermediate level and 3) Advanced level. Supporting factors are all factors that encourage, support, smooth, support, help, speed up and so on the occurrence of something. Meanwhile, inhibiting factors are all types of factors that hinder (make it slow) or even prevent and prevent something from happening. The supporting and inhibiting factors for the implementation of the Buton Regency National Awakening Party are 1) Supporting factors include leadership style, recruitment of cadres and cadres, having a relationship with the people, the existence of funding, and a platform for struggle. 2) Inhibiting factors in leadership style, control of cadres in politics, political party management is not yet based on planning, organizing, implementing and controlling.

Key words: Implementation, Political Parties, Political Recruitment

PENDAHULUAN

Kelompok ideologis memiliki peran penting dalam kerangka politik di suatu negara, anggota yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif akan berbicara kepada rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hanya sebagai tempat untuk memenuhi keinginan anggota kader baru dalam menentukan pilihan bersama (Muslimah, 2020).

Gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam negara demokrasi mempunyai dasar ideologis, bahwa dalam proses pemberian suara, rakyat menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk memilih siapa yang memerintah mereka dan menentukan wakil-wakil mereka yang nantinya menentukan kebijakan umum (Public policy) (Tompondung, Monalisa C. Tumanduk, 2022). Partisipasi politik merupakan kapasitas prinsip kelompok ideologis dalam menyelesaikan tugasnya sebagai spesialis perantara atau kontak antara warga dan negara di tepi penggambaran publik. Melalui rekrutmen politik, partai politik dapat mendampingi warga yang ingin duduk di kursi pemerintahan, baik pemerintahan (DPR dan DPRD), pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden), dan kepala teritorial. Sehingga tujuan utama sistem berbasis suara pemerintah dapat berjalan dengan baik (Muslimah, 2020).

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya kedaulatan tersebut diserahkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen (Fahmi, 2016). Karena itu setiap 5 tahun sekali Indonesia melakukan Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga tersebut. Para wakil rakyat berasal dari partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat (Subiyanto, 2020).

Partai politik memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi (Arianto, 2004). Karena dengan sistem demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat dan rakyat tidak dapat menjalankan kekuasaan tersebut secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan umum (Noviati, 2016). Di Indonesia, beberapa undang-undang tentang partai politik telah diundangkan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang memuat syarat-syarat pembentukan partai politik di Indonesia, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik serta berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan adanya undang-undang kepartaian tentunya lebih ditekankan secara prosedural berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan seperti apa seharusnya parpol itu sendiri (Syahid, 2021).

Partai politik hadir di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu (Andrias, 2013). Cara yang di gunakan oleh partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum (Lindawati, 2014).

Salah satu fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah seleksi pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang disebut rekrutmen politik (Siantuari, 2015). Perekrutan politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan (Fitriyah, 2020). Pengrekrutan ini merupakan proses dua-arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas (Fakhruzy, 2020).

Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara (Muh Amril Pratama Putra, Hasan Rahman, 2022). Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada (Satriyogi Pratama, 2014). Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya (Kusuma et al., 2020). Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik (Erly Hasim, 2016).

Berkaitan dengan rekrutmen politik diatur sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik pada pasal 11 yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Yunus, 2021). Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif (Efriza, 2019).

Sumber daya yang paling utama dalam berpolitik adalah sumber daya manusia, karena partai politik tidak digerakkan oleh mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian, cara organisasi partai politik dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik (Sudrajat, 2016). Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen, tentunya orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut (Ariwibowo Hendri, Budi Setiyono, 2013). Persaingan dengan partai politik lain juga akan terjadi untuk memperebutkan orang-orang berpotensi yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya (Fitria Barokah, Tabah Maryanah, Ari Darmasturi, 2022).

Namun, terdapat banyak sekali permasalahan dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh partai politik, misalnya banyak sekali penguasa yang dirangkul oleh partai politik dan terkadang partai politik tersebut merekrut tanpa melihat pengetahuan dan keahlian mereka, terutama yang berkaitan dalam dunia politik. Akibatnya kerap kali dilupakan perlunya system kadernisasi dalam tubuh partai politik.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai yang mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten Buton pada Pemilu Tahun 2019. Partai Kebangkitan Bangsa berhasil memperoleh 2 kursi di DPRD kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 248/HK.03.1-Kpt /KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019.

Rekrutmen politik yang dimaksud adalah rekrutmen politik yang dilaksanakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Kabupaten Buton, yaitu rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik dan rekrutmen untuk menjadi calon wakil rakyat sebagai anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Menurut UU No.2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Budiarto (2006:160), partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara (Tompondung, Monalisa C. Tumanduk, 2022). Sedangkan Rusadi Kantaprawira mengatakan bahwa partai politik, yaitu organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (ideal objective), mempunyai program politik (political platform, material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (Kantaprawira, 2004:63).

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil dari pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat (Hamid, 2008:9).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan yang disebut partai politik adalah suatu organisasi yang terorganisir dan mempunyai cita-cita, ideologi, pandangan serta tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan agar dapat memegang kontrol terhadap pemerintahan.

Diatur pula mengenai fungsi partai politik yang tertulis dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Rekrutmen Politik

Partai politik sebagai suatu organisasi berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Sebagaimana disebutkan dari peran dan fungsi partai politik yang telah dipaparkan diatas, fungsi sebagai sarana rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting, baik bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri maupun untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas sebab dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Meilandi (Tompondung, Monalisa C. Tumanduk, 2022) Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain itu, menurut (Wijayanti & Iswandi, 2021) partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan, maka partai berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin keberlangsungan dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk melatih calon-calon pemimpin.

Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui media komunikasi menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Fungsi ini dijalankan melalui pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan public, dalam sistem otoritarian ia di tunjuk atau di angkat , sedang dalam sistem politik demokratis ia dipilih melalui pemilihan umum (Hamid, 2008:11).

Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu mencari anggota-anggota yang baru dan mengajak mereka yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam hal ini, rekrutasi atau rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin (Febrian, 2016). Dengan demikian, berarti masalah rekrutasi atau rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kaderisasi dan partisipasi politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 29 mengatur ketentuan lebih lanjut dari fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu sebagai berikut:

1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Rekrutmen dan seleksi politik merupakan proses yang menentukan karakteristik bakal calon yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan jabatan atau posisi tertentu. Maka berbagai macam cara bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil bakal calon atau pelamar yang sesuai kriteria.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. metodologi kualitatif menurut Bongdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4), yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Tujuan menggunakan metodologi kualitatif pada penelitian ini adalah agar peneliti dapat mendeskripsikan mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Buton.

Dalam fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik terdapat konsep sistem dalam proses pengkaderan, merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena sebuah partai politik memiliki sistem kaderisasi yang berbeda tergantung dari model partai yang dianutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Kaderisasi merupakan sebuah penggodokan atau menyiapkan sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam melahirkan pemimpin dan kader yang loyal serta berkualitas terhadap partai politik, maka perlu mengkaji lebih dalam tentang sistem kaderisasi yang dilakukan oleh sebuah partai politik. Apalagi Partai PKB yang sudah mempunyai nama dalam usahanya untuk mencetak para kader-kader loyal dan berkualitas serta menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai sistem politik berbangsa dan bernegara. Dari pemaparan Bapak Lanaba Kasim sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buton selaku salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti bahwasanya:

“Terkait dengan adanya kaderisasi merupakan sebuah penggodokan atau menyiapkan sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam melahirkan pemimpin dan kader yang loyal serta berkualitas terhadap partai politik, maka perlu mengkaji lebih dalam tentang sistem kaderisasi yang dilakukan oleh sebuah partai politik. Apalagi Partai PKB yang sudah mempunyai nama dalam usahanya untuk mencetak para kader-kader loyal dan berkualitas serta menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai sistem politik berbangsa dan bernegara” (Wawancara, 17 Mei 2023).

Kaderisasi sangat penting untuk masa depan organisasi yang lebih baik, dengan penemuan kembali organisasi yang mempersiapkan penerusnya di masa depan. Penekanan organisasi tidak boleh semata-mata pada keberlangsungan dan keberhasilan agenda yang disusun, karena suatu program kerja dapat berjalan dengan baik atau tidak tergantung siapa yang melaksanakannya.

Salah satu fungsi dari adanya kaderisasi dalam suatu organisasi Informan Bapak Surfin

juga mengatakan kepada peneliti bahwasanya:

“Salah satu fungsi dari adanya kaderisasi dalam suatu organisasi ialah untuk mendokumentasikan penilaian *forward-tobackward*. Tujuan dari penilaian ini adalah agar penerus organisasi di masa depan mengetahui kesalahan apa yang dilakukan manajemen sebelumnya. Tentunya, diharapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada pemerintahan sebelumnya tidak terulang lagi pada pemerintahan berikutnya” (Wawancara, 17 Mei 2023).

Dapat disimpulkan apabila dalam suatu organisasi tidak ada kaderisasi maka individu yang nantinya menjadi seorang pemimpin baru atau anggota baru akan buta dalam berorganisasi, dikarenakan tidak adanya landasan atau pengetahuan yang diberikan secara spesifik oleh kepengurusan terdahulu mengenai organisasi tersebut. Tentunya dapat dibayangkan bagaimana masa depan organisasi tersebut apabila dipimpin oleh individu yang buta dalam berorganisasi. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran penting, yaitu mencari dan mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin nasional. Untuk melaksanakan peran tersebut, partai politik dituntut memiliki proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik, serta memiliki tahapan yang terstruktur, agar nantinya tidak muncul istilah "pemimpin instan". Bapak Harim yang menjadi salah satu informan dalam penelitian ini mengatakan kepada peneliti bahwasanya:

“Proses rekrutmen merupakan hal yang paling penting dari fungsi partai politik, karena hasilnya akan berdampak secara signifikan secara politik, misalnya: (1) dapat mempengaruhi dinamika internal partai politik, termasuk menciptakan konflik internal partai; (2) dapat mempengaruhi komposisi anggota di dalam lembaga eksekutif dan legislatif; dan (3) akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif” (Wawancara, 19 Mei 2023).

Pada bentuk pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Buton adalah kampanye pengenalan partai baik melalui seminar partai politik, diskusi tentang partai politik serta melakukan pengkaderan. Sasaran pengkaderan DPC PKB Kabupaten Buton ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah terorganisir maupun bagi yang belum terorganisir dari kelompok masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai di lapangan adalah kampanye dengan mengajak masyarakat dalam pengenalan Visi/Misi partai tersebut, Keberhasilan menarik minat masyarakat ditentukan oleh tingkat keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pengkaderan. Peneliti juga mendapatkan informasi dari Ibu Defianti, bahwasanya:

“Bentuk pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Buton adalah kampanye pengenalan partai baik melalui seminar partai politik, diskusi tentang partai politik serta melakukan pengkaderan. Sasaran pengkaderan DPC PKB Kabupaten Buton ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah terorganisir maupun bagi yang belum terorganisir dari kelompok masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai di lapangan adalah kampanye dengan mengajak masyarakat dalam pengenalan Visi/Misi partai tersebut, Keberhasilan menarik minat masyarakat ditentukan oleh tingkat keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pengkaderan” (Wawancara, 17 Mei 2023).

Peneliti juga mendapatkan informasi dari Ibu Rahima, bahwa:

“Semua elemen organisasi harus bersikap untuk mendukung terselenggaranya program ini, pengoptimalan program pengkaderan dapat dibentuk melalui lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator, pengkaderan partai kebangkitan bangsa menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk merebut masa depan. Pengkaderan merupakan kegiatan rutin DPC PKB Kabupaten Buton guna untuk mendapatkan kader-kader yang menjadi penerus pengurus dari partai itu sendiri” (Wawancara, 19 Mei 2023).

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Proses rekrutmen dan kaderisasi dalam demokrasi dapat diibaratkan seperti bercocok tanam untuk mendapatkan hasil yang unggul, yang juga harus diikuti dengan memilih, menanam dan mengolah bibit itu secara unggul pula. Pengkaderan merupakan proses bertahap dan terus menerus sesuai tingkatan capaian situasi dalam kebutuhan tertentu yang memungkinkan seseorang kader dapat mengembangkan potensi, akal, fisik dan moral sosialnya. Pengkaderan juga dilakukan agar menghindari terjadinya politik pragmatis serta melahirkan kader-kader yang berkualitas itulah mengapa sangat penting diadakannya pengkaderan dalam menjaga kontinuitas atau stabilitas pada partai PKB.

Bapak Lanaba Kasim sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buton juga mengatakan kepada peneliti bahwasanya:

“Pada saat ini sistem kaderisasi PKB telah dibangun secara berjenjang, terstruktur, dan sistematis sebagaimana yang tertuang pada pasal 98 AD/ART PKB yang berbunyi: a) Rekrutmen anggota dan pengurus partai dilakukan melalui sistem kaderisasi yang berjenjang, terstruktur dan sistematis. b) Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus partai yang hendak mendapatkan promosi jabatan strategis di internal partai dan atau pemerintah. c) Kaderisasi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penilaian kinerja dewan pengurus partai sesuai tingkatannya” (Wawancara, 21 Mei 2023).

Bapak Surpin sebagai Ketua Dewan Tanfidz salah satu informan yang dipilih guna mendapatkan informasi terkait pendidikan DPC PKB juga mengatakan kepada peneliti bahwasanya:

“Pendidikan kader dalam DPC PKB sangat dibutuhkan. Banyak sekali unsur strategi yang dilakukan. Contohnya seperti melalui unsur perempuan bangsa, garda santri, garda gemasaba” (Wawancara, 21 Mei 2023).

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Harim selaku Dewan Tanfidz dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan bahwasanya:

“Dalam pendidikan kader pertama (PKP) akan mampu menjaga kesinambungan dan mempercepat program perjuangan partai dengan mempersiapkan kelahiran kembali kepemimpinan PKB. Melalui program pendidikan bagi pemula ini, kader harus memiliki semangat yang besar untuk mengembangkan partai PKB di masyarakat dan mempertahankan NKRI. Setiap kerangka kerja harus terlebih dahulu mengikuti beberapa tingkat atau tahap. pertama, mulai dari pemula, menengah hingga nanti untuk eksekutif dasar. Ada tiga tahapan model pengkaderan di partai PKB, yaitu: 1) Tingkat Dasar, seperti pemahaman organisasi PKB, penanaman tetrhadap loyalitas kepada partai PKB dan memantapkan desdikasi kepada partai PKB, 2) Tingkat Menengah seperti meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi partai PKB, membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai dan menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi partai PKB, 3) Tingkat Mahir seperti mendidik berpikir futuristik, membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dan cara mengantisipasinya, membidik cara berpikir sistematis dan strategis” (Wawancara, 21 Mei 2023).

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Pendidikan kader pertama (PKP) akan mampu menjaga kesinambungan dan mempercepat program perjuangan partai dengan mempersiapkan kelahiran kembali kepemimpinan PKB. Melalui program pendidikan bagi pemula ini, kader harus memiliki semangat yang besar untuk mengembangkan partai PKB di masyarakat dan mempertahankan NKRI. Setiap kerangka kerja harus terlebih dahulu mengikuti beberapa tingkat atau tahap. pertama, mulai dari pemula, menengah hingga nanti untuk eksekutif dasar. Ada tiga tahapan model pengkaderan di partai PKB, yaitu: a) Tingkat Dasar, yang dimana pada tingkat dasar ini adanya jenjang pendidikan gunanya untuk pemahaman arti berorganisasi, menanamkan loyalitas terhadap organisasi, memantapkan dedikasi. b) Tingkat Menengah, adanya pendidikan diarahkan guna membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai, menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. c) Tingkat Mahir, adanya pendidikan guna membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, membidik cara berpikir sistematis dan strategis, membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-preistiwa politik dan cara mengantisipasinya, mendidik berpikir futuristik.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Tekait dengan faktor pendukung dan penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Buton terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik peneliti sudah mewawancarai beberapa informan pilihan dalam penelitian ini. Bapak La Naba Kasim selaku Ketua Dewan

Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buton mengatakan bahwa:

“Peningkatan kualitas partai politik mendesak dilakukan. Sebab, partai politik memiliki tugas mencetak kader-kader berkualitas. Akan tetapi pada setiap kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun lembaga biasanya akan memperoleh dukungan dari masyarakat atau bahkan akan mendapatkan tentangan dari masyarakat, telah disinggung dibagian bab sebelumnya tujuan, isi atau materi dan metode pengkaderan itu harus sejajar dengan pembaharuan terhadap setruktur-setruktur partai politik dan struktur kemasyarakatan. Tegasnya pengkaderan itu tidak hanya diarahkan pada perubahan politik individu saja akan tetapi juga diarahkan pada pembaharuan bentuk-bentuk kualitas struktur politik dan lembaga masyarakat” (Wawancara, 4 Juni 2023).

a) Faktor Pendukung

Bapak Surpin sebagai Dewan Tanfidz, terkait faktor pendukung dalam strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Buton terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik, mengatakan bahwasanya:

“Faktor pendukung strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Buton terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik yang pertama ada gaya kepemimpinannya, yang dimana dalam mengarahkan ada ketegasan, sistem yang baik maka akan menakdikan DPC PKB semakin berjaya maka hal tersebut akan menjadikan faktor pendukung. kedua rekrutmen kader dan kaderisasi, jika adanya rekrutmen kader dan kaderisasi sesuai standar yang baik maka akan menjadikan faktor pendukung bagi DPC PKB, ketiga mempunyai relasi dengan rakyat, dengan mengikuti organisasi-organisasi yang diikuti anggota DPC PKB seperti Ipnu-Ipnu dan lain-lain maka akan memepererat hubungan mereka dengan rakyat. keempat adanya pendanaan jika dalam organisasi ada pendanaan dari atasan maka akan menjadikan faktor pendukung bagi DPC PKB dan kelima wadah perjuangan, seperti organisasi-organisasi DPC PKB yang dibuat sebagai wadah untuk mencetak kader yang berkualitas dalam berpolitik” (Wawancara, 4 Juni 2023).

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Harim sebagai Dewan Tanfidz, bahwasanya:

“Faktor pendukung dalam strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Buton terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik yang pertama mempunyai relasi dengan rakyat, gaya kepemimpinan dari ketua partai PKB dan adanya rekrutmen kaderisasi” (Wawancara, 4 Juni 2023).

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya yang menjadi faktor pendukung strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Buton terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik adalah 1) Gaya kepemimpinan, jika kepemimpinan dari ketua PKB baik maka akan menjadikan faktor pendukung terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik. 2) Rekrutmen kader, jika pelaksanaannya dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk sekaligus menjadi faktor pendukung bagi praktek demokrasi yang baik pada suatu negara apalagi di Kabupaten Buton. 3) Mempunyai relasi dengan masyarakat atau rakyat, jika para elit dan anggota DPC PKB Kabupaten Buton mempunyai relasi yang bagus dengan masyarakat maka akan menjanjikan faktor pendukung. 4) adanya pendanaan, jika dana yang dikerluarkan bisa dimanaj dan digunakan dengan baik maka akan menjadikan faktor pendukung juga bagi strategi kaderisasi DPC Kabupaten Buton.

b) Faktor Penghambat

Penjelasan pada faktor penghambat ini Bapak La Naba Kasim selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buton dalam strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Buton terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik, mengatakan:

“Faktor penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Buton terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik yang pertama gaya kepemimpinannya, kedua pengendalian kader dalam berpolitik dan ketiga, pengelolaan manajemen parpol belum berdasarkan *planning, organizing, actuating, controlling*” (Wawancara, 8 Juni 2023).

Sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Defianti sebagai Dewan Tanfidz terkait faktor penghambat, mengatakan:

“Faktor penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Buton terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik 1) ada cara memimpin, 2) pengelolaan manajemen parpol yang



kurang baik, 3) kurangnya pengendalian kader dalam berpolitik” (Wawancara, 8 Juni 2023).

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya yang menjadi faktor penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Buton terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik adalah gaya kepemimpinan, pengendalian kader dalam berpolitik dan pengelolaan manajemen parpol belum berdasarkan *planning, organizing, actuating, controlling*.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buton sebagai sarana rekrutmen yaitu melalui Pendidikan Kader Pertama (PKP) diharapkan bisa menjaga keberlangsungan dan akselerasi program perjuangan partai dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan PKB. Melalui pendidikan pemula ini para kader diharapkan memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan partai PKB dimasyarakat serta menjunjung tinggi NKRI. Setiap kader harus mengikuti beberapa jenjang atau tahapan terlebih dahulu dimulai pemula, menengah hingga nanti ke kader inti. Ada tiga tahap pola pengkaderan di dalam partai PKB yaitu: 1) Tingkat dasar 2) Tingkat menengah dan 3) Tingkat Lanjut.

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu. Sedangkan faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Adapun faktor pendukung dan penghambat Implementasi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buton yaitu 1) Faktor pendukung ada gaya kepemimpinannya, rekrutmen kader dan kaderisasi, mempunyai relasi dengan rakyat, adanya pendanaan, dan wadah perjuangan. 2) Faktor penghambat gaya kepemimpinannya, pengendalian kader dalam berpolitik, pengelolaan manajemen parpol belum berdasarkan *planning, organizing, actuating, controlling*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, M. A. dan T. N. (2013). Partai Politik dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(3), 352–372. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/MAATN>
- Arianto, H. (2004). PERANAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA. *Lex Journalica*, 1(2), 77–89.
- Ariwibowo Hendri, Budi Setiyono, R. M. (2013). Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN*, 1(1), 1–13.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>
- Fakhruzy, A. (2020). Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3729>
- Febrian, R. K. (2016). PENGGUNAAN MODALITAS CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA PEKANBARU PERIODE 2019-2024. *JOM FISIP*, 9(2), 1–23. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/33732/32425>
- Fitria Barokah, Tabah Maryanah, Ari Darmasturi, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>



- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Hamid, Ahmad. F. 2008. Partai Politik Lokal di Aceh - Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan. Jakarta: Kemirnaan.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cetakan kesembilan.
- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164–169. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>
- Lindawati, D. S. (2014). Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014. *Politica*, 4(2), 287–312.
- Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muh Amril Pratama Putra, Hasan Rahman, & M. (2022). POLA REKRUITMEN POLITIK PARTAI NASDEM KOTA MAKASSAR MENUJU PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024. *KYBERNOLOGY : Journal of Government Studies*, 2(1), 9–20.
- Muslimah, S. (2020). IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Tompondung, Monalisa C. Tumanduk, A. B. P. J. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdip) Kabupaten Minahasa Selatan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Satriyogi Pratama. (2014). PERUBAHAN POLA REKRUITMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PASCA DITETAPKAN SEBAGAI PARTAI TERBUKA PADA PEMILU 2014 DI KOTA SEMARANG. *European Journal of Endocrinology*, 171(6), 727–735. <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Siantuari, K. A. (2015). Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (Strengthening The Recruitment Function Of Political Party). *Legislasi Indonesia*, 12(1), 1–22.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sudrajat, T. (2016). Penerapan Manajemen Strategik untuk Partai Politik Pada Era Demokratisasi: Tantangan, Permasalahan dan Prospek. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(2), 305–326. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/96>
- Syahid, I. (2021). *Implementasi Rekrutmen Anggota Partai Pks*. 9(4), 261–272.
- Tompondung, Monalisa C. Tumanduk, A. B. P. J. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdip) Kabupaten Minahasa Selatan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia. *Sasi*, 27(4), 475. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.563>
- Yunus, W. (2021). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Tinjau dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 di Kota Palopo. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 64–78.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik